PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Selasa Tanggal: 25 Januari 2011 Halaman: 14

Penataan Malioboro mulai disusun

Oleh Rina Wijayanti
HARIAN JOGJA

JOGJA: Pemkot Jogja bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyusun rumusan kebijakan pengembangan kawasan Malioboro.

Empat aspek pokok menjadi dasar rumusan kebijakan pengembangan kawasan Malioboro tersebut yaitu aspek ekonomi, sosial, fisik dan aspek hukum.

Kepala Bappeda Kota Jogja, Aman Yuriadijaya saat dijumpai Senin (24/1) menjelaskan dengan empat komponen dasar tersebut diharapkan kawasan Malioboro dapat berkembang serta dilandasi aturan yang jelas.

Herry Zudianto DOK

Dijelaskan Aman, saat ini Pemkot Jogja mendapatkan bantuan teknis untuk menyusun rumusan kebijakan pengembangan kawasan Malioboro dari Bappenas. Dijelaskannya saat ini tengah dalam proses.

"Jadi nantinya penataan Malioboro tidak hanya menyasar pada pembenahan fisik saja, melainkan pula aspek sosial, ekonomi dan hukum," jelas Aman.

Ditambahkannya, keempat aspek tersebut harus berjalan sinergis dan menyatu. "Semua harus sinergis, jika hanya bicara fisik tanpa ada perbaikan penataan ekonomi dan hukum maka akan timpang," imbuhnya.

Menurut Aman, seluruh aspek penataan kawasan Malioboro memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Aspek hukum dipandang Aman paling kompleks dibanding penataan ketiga aspek lainnya. Menurutnya, di kawasan Malioboro banyak terdapat tanah yang berstatus milik Keraton. (magersari). Pengelolaannya dijelaskan Aman secara beragam. Ada yang diperuntukkan PT. KA serta para pelaku usaha.

Aman menjelaskan perikatan kepemilikan itulah yang harus segera mendapat sistem penataan. "Perikatan antar hak tanah ini kan seharusnya jelas, ada tanah yang menjadi milik Keraton dan dikelola oleh PT. KA maka inilah yang seharusnya jelas peraturannya," tegas Aman.

Sementara kerumitan aspek sosial, dijelaskan Aman terletak pada penataan aspek sosial di kawasan Malioboro. Seperti diketahui saat ini kawasan Malioboro berkembang sebagai sarana pertumbuhan berbagai komunitas di kota Jogja. Melalui formulasi kebijakan tersebut pula, papar. Aman, pihaknya akan menuangkan perkembangan komunitas di kawasan Malioboro.

"Aspek sosial dalam rangka menjaga pertumbuhan komunitas di kawasan Malioboro perlu pula menjadi perhatian utama kita, sehingga keseluruhannya menjadi hal yang sinergis," kata Aman.

Terpisah, Walikota Jogja, Herry Zudianto menambahkan penataan yang akan dilakukan tersebut tidak akan mengubah Malioboro. "Bukan mengubah melainkan menata. Sampai saat ini pelaku ekonomi cenderung membiarkan apa yang sudah ada. Nah itulah yang akan kita tata," tegas Herry.

Mengingat kepentingan penataan kawasan Malioboro, pemerintah menargetkan akhir 2011 formulasi kebijakan penataan Malioboro tersebut akan dapat terbentuk. "Target akhir berupa produk rumusan revitalisasi kawasan Malioboro kami harapkan selesai pada akhir 2011 mendatang," imbuh Herry.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pemukiman dan Prasarana 3. Badan Perencanaan Pembangunan 4. UPT. Malioboro	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005